

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Menurut Todaro dan Smith (2006) pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Wahidin et al., 2022). Sehingga tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro (2000) adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran (Alfiansyah & Budyanra, 2019).

Namun, pada kenyataannya pembangunan di Indonesia masih tidak merata, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan suatu keadaan, dimana adanya perbedaan kondisi wilayah antara wilayah maju dan wilayah terbelakang. Hal ini dikarenakan, daerah yang terbelakang belum mampu memaksimalkan potensi dalam daerah tersebut. Kurangnya sumber daya yang dimiliki, sehingga terjadi jarak antara daerah maju dan daerah terbelakang. Akibat dari adanya perbedaan ini, kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses pembangunan tentunya akan berbeda.

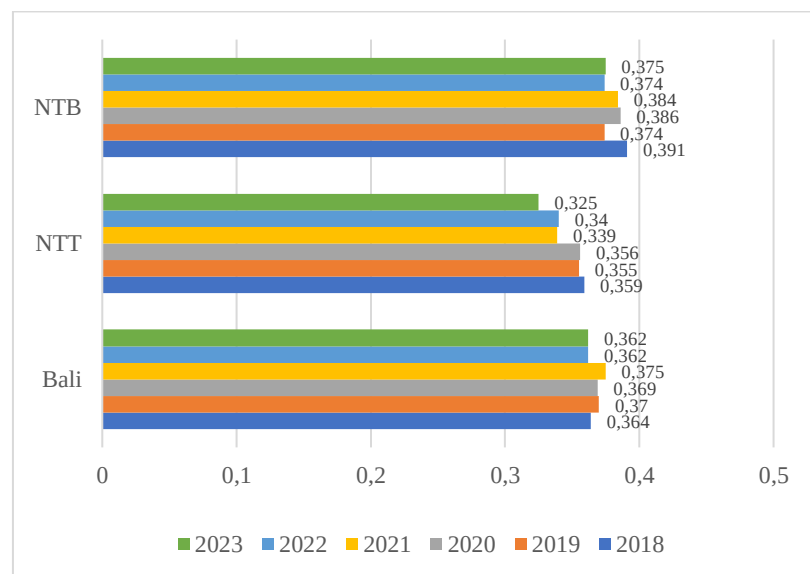
Di satu sisi ada wilayah yang pembangunannya relatif cepat sedangkan disisi lain, ada wilayah yang pembangunannya relatif lambat. Sehingga terjadinya ketimpangan pembangunan ini akan mendorong terciptanya kemiskinan di suatu wilayah, akibat dari pembangunan yang semakin terpusat hanya di suatu wilayah dan semakin banyaknya pembangunan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat (Mansyur et al., 2021). Menurut Sjafrizal (2008) ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah yaitu, perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antar wilayah (Matondang, 2018).

Untuk melihat ketimpangan yang terjadi, salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur ketimpangan pendapatan melalui indeks Gini. Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1, dimana Gini Ratio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dan sebaliknya Gini Ratio yang bernilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna (Prawiradinata, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Gini Ratio Indonesia pada Maret 2023 sebesar 0,388 poin. Perolehan tersebut meningkat sebesar 0,004 dari Maret 2022 yang masih di angka 0,384 poin. Tingkat ketimpangan Gini Ratio teratas di Indonesia pada Maret 2023 posisi pertama adalah DI Yogyakarta tercatat sebesar 0,449 poin. Kedua adalah DKI Jakarta dengan Gini Ratio 0,431 poin. Urutan ketiga adalah Jawa Barat dengan nilai Gini Ratio 0,425 poin. Menyusul Gorontalo diposisi

keempat sebesar 0,417 poin. Kelima, Jawa Timur dengan Gini Ratio 0,387 poin. Keenam, Papua dengan Gini Ratio 0,386 poin. Ketujuh, Sulawesi Selatan dengan Gini Ratio 0,377 poin. Kedelapan, Nusa Tenggara Barat sebesar 0,375 poin. Kesembilan, Sulawesi Tenggara dengan Gini Ratio 0,371 poin dan kesepuluh, Sulawesi Utara sebesar 0,37 poin (Santika, 2023).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menyatakan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi dengan ketimpangan tertinggi kedelapan di Indonesia. Adapun perkembangan ketimpangan Gini Ratio di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali pada periode tahun 2018-2023 dan perkembangan ini dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut.



Sumber : Kementrian Keuangan dalam (Alifarman et al., 2023) (diolah)

Gambar 1. 1 Perkembangan Ketimpangan Gini Ratio di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan data pada gambar 1.1, bahwa pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan tertinggi di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali berada di Provinsi NTB

sebesar 0,375 meningkat 0,001 dari tahun 2022, sedangkan ketimpangan pendapatan terendah berada di Provinsi NTT sebesar 0,325. Penurunan ketimpangan pendapatan tertinggi dicapai oleh Provinsi NTT sebesar 0,015. Penjelasan ini memperkuat bahwa Provinsi NTB adalah salah satu provinsi dengan ketimpangan yang sangat tinggi di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali.

Mengenai ketimpangan, jika dilihat dari letak geografis luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 km² lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi NTT mencapai 47.350 km². Selain itu, Provinsi NTB merupakan provinsi yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memiliki banyak destinasi wisata seperti, pulau, laut dan gunung. Namun, dengan luas wilayah yang kecil dan terkenal suatu wilayah akan kekayaan alamnya. Hal ini, tidak serta merta menjamin bahwa pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi NTB dilakukan secara merata.

Masalah ketimpangan pembangunan ini terjadi diantar wilayah Kabupaten/Kota Provinsi NTB atau singkatan dari Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografis NTB adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di antara Provinsi Bali di sebelah barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah timur. Berikut adalah peta administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Sumber: Wikipedia, NTB

Gambar 1. 2 Peta Administrasi Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 1.2, Provinsi NTB terdiri atas dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta ratusan pulau-pulau kecil. Pulau Lombok terdiri dari, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sedangkan Pulau Sumbawa terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima. Masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan yang secara letak geografis dan potensi sumber daya alam sehingga memiliki pengaruh kuat terhadap terciptanya pembangunan ekonomi di Provinsi NTB.

Keanekaragaman dan penyebaran yang sangat luas di Provinsi NTB dapat mencerminkan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi di antar wilayahnya. Tentunya potensi di setiap wilayah akan berbeda-beda antar satu sama lain, sehingga menimbulkan kemampuan tumbuh yang berbeda di setiap wilayah. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya, dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

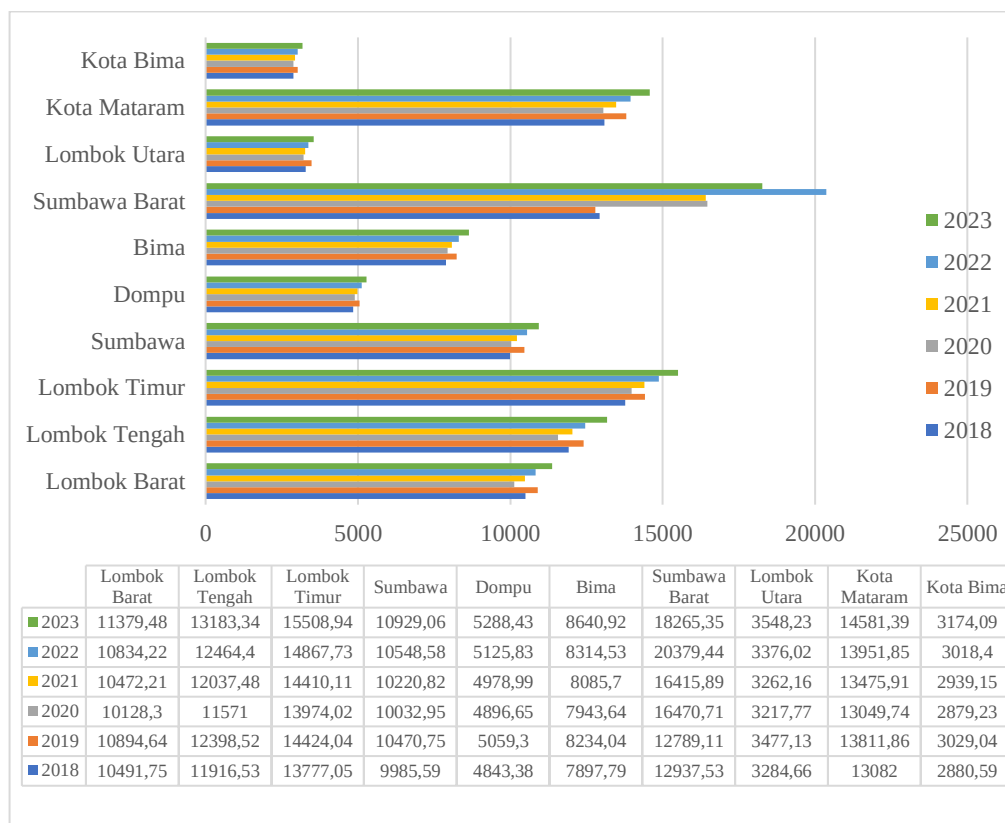
Untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat menggunakan analisis indeks Williamson. Indeks Williamson dapat menggambarkan ketimpangan yang terjadi antar wilayah, berbeda dengan indeks gini yang menjelaskan ketimpangan yang terjadi antargolongan pendapatan masyarakat. Nilai indeks Williamson berkisar antara 0 dan 1. Nilai indeks yang mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan antar wilayah yang semakin tinggi. Sebaliknya, indeks yang mendekati 0 mengindikasikan ketimpangan antar wilayah yang semakin rendah (Sjafrizal, 2012) dalam (Alfiansyah & Budyanra, 2019).

Simon Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Hal ini dikenal dengan kurva Kuznets “U terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam pendistribusian pendapatan. Ketimpangan merupakan masalah yang ekstrim yang dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas ekonomi dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004) mengutip dalam (Alfiansyah & Budyanra, 2019).

Dengan demikian ketimpangan pembangunan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan potensi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, untuk melakukan pembangunan yang terarah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan suatu kebijakan dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melalui analisis Tipologi Klassen dalam pengklasifikasian daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan (Sjafrizal, 2014) dalam (Syaifudin et al., 2022).

Disisi lain, Provinsi NTB merupakan wilayah yang unggul dari sektor perikanan dan kelautan. Sementara itu, Provinsi NTB merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Adapun tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Meningkatnya PDRB maka secara langsung akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah (Sulistyo, 2017). Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas harga dasar konstan antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun 2018-2023.



Sumber: (BPS Provinsi NTB, 2021) (diolah)

Gambar 1. 3 PDRB ADHK Kabupaten/Kota NTB Tahun 2018-2023
(Milyar)

Berdasarkan gambar 1.3, menunjukkan data perkembangan PDRB ADHK Kabupaten/Kota Provinsi NTB cukup bervariasi. Namun secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terlihat dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2018-2023 PDRB yang tinggi ada pada

Kabupaten Sumbawa Barat, yang diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram. Yang ditunjukkan dengan nilai masing-masing PDRB pada tahun 2023 mencatat sebesar 18.265,35 milyar, 15.508,94 milyar dan 14.581,39 milyar. Sedangkan PDRB yang rendah berada pada Kota Bima 3.174,09 milyar dan Lombok Utara sebesar 3.548,23 milyar.

Pada tahun 2018-2021 terlihat jelas cukup berfluktuatif, terutama pada Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Sumbawa sebesar 12.937,53 milyar. Hal ini disebabkan adanya bencana alam gempa bumi yang berdampak pada wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa akibatnya terjadi kerusakan bangunan dan infrastruktur dasar, sehingga hal ini menjadi faktor utama penyebab turunnya PDRB yang signifikan di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan pada tahun 2019 proses pemulihan dari bencana gempa bumi yang diwarnai oleh giatnya rekonstruksi bangunan telah membawa PDRB meningkat kembali.

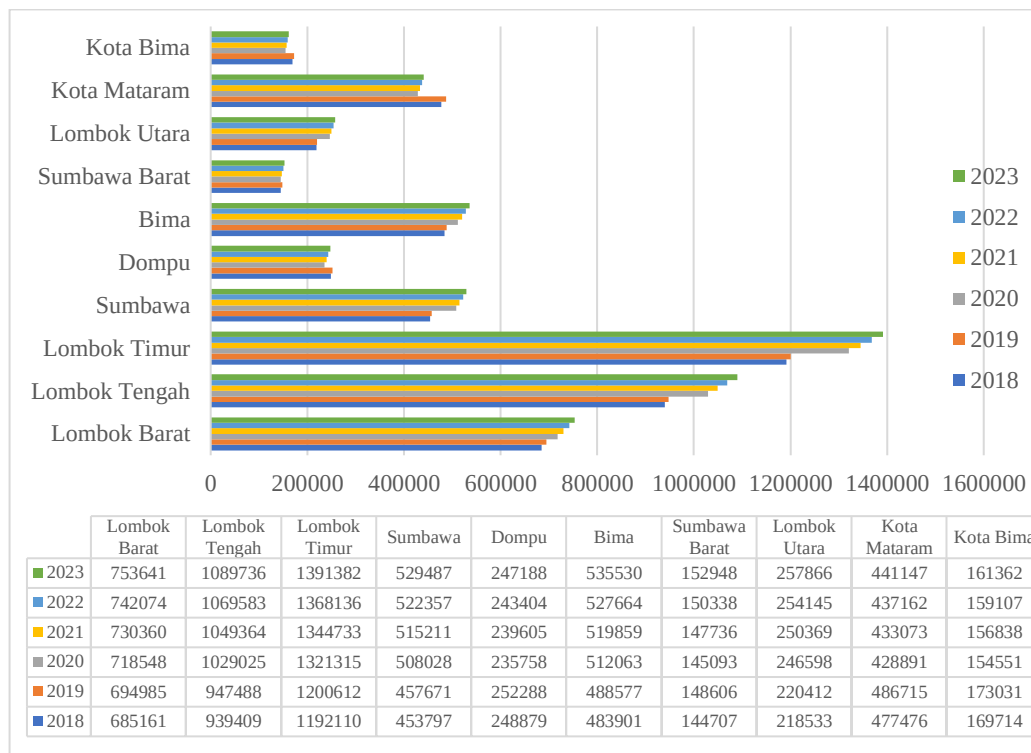
Sedangkan pada tahun 2020 secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi NTB mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Yang kemudian pada tahun 2021-2022 secara keseluruhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sektor non-tambang menjadi penyumbang PDRB sehingga mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan keinginan pemerintah NTB yang berfokus terhadap pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan sebagai bentuk diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak hanya sebatas dengan membandingkan data PDRB saja, jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi terhadap ketimpangan pembangunan. Jumlah penduduk adalah jumlah keseluruhan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis pada kurun waktu tertentu. Faktor demografis yaitu fertilitas atau kelahiran memiliki pengaruh besar terhadap tingginya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.

Khoirdan Pujiati (2016) menyebutkan bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan dalam suatu daerah, hal ini tidak dapat terjadi apabila dalam suatu daerah terjadi ketidakmerataan persebaran jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah yang tidak diiringi dengan penambahan kesempatan kerja, akan menimbulkan permasalahan semakin tingginya pengangguran mengutip dalam (Pamiati & Woyanti, 2021).

Hal ini menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat dan penawaran kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja. Menurut Ademan dan Moris (2004) pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah angka jumlah penduduk dan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, jumlah penduduk yang tinggi turut memberikan kontribusi terhadap lambatnya pembangunan ekonomi (Nursetianingrum, 2018).

Adapun perkembangan jumlah penduduk antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTB periode tahun 2018-2023 yang dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan pertumbuhan penduduk, ialah sebagai berikut.



Sumber: (BPS Provinsi NTB, 2023) (diolah)

**Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Tahun 2018-2023 (Jiwa)**

Berdasarkan gambar 1.4, secara keseluruhan pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mana sampai pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.391.382 jiwa, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1.089.736 jiwa, Kabupaten Lombok Barat sebesar 753.641 jiwa, Kabupaten Bima sebesar 535.530 jiwa, Kabupaten Sumbawa sebesar 529.487 jiwa, Kota Mataram 441.147 jiwa, Kabupaten Lombok Utara sebesar 257.866 jiwa, Kabupaten Dompu sebesar 247.188 jiwa, Kota Bima sebesar 161.362 jiwa dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 152.948 jiwa.

Melihat pada data, Pulau Lombok merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling banyak, diraih dengan posisi pertama yaitu Kabupaten

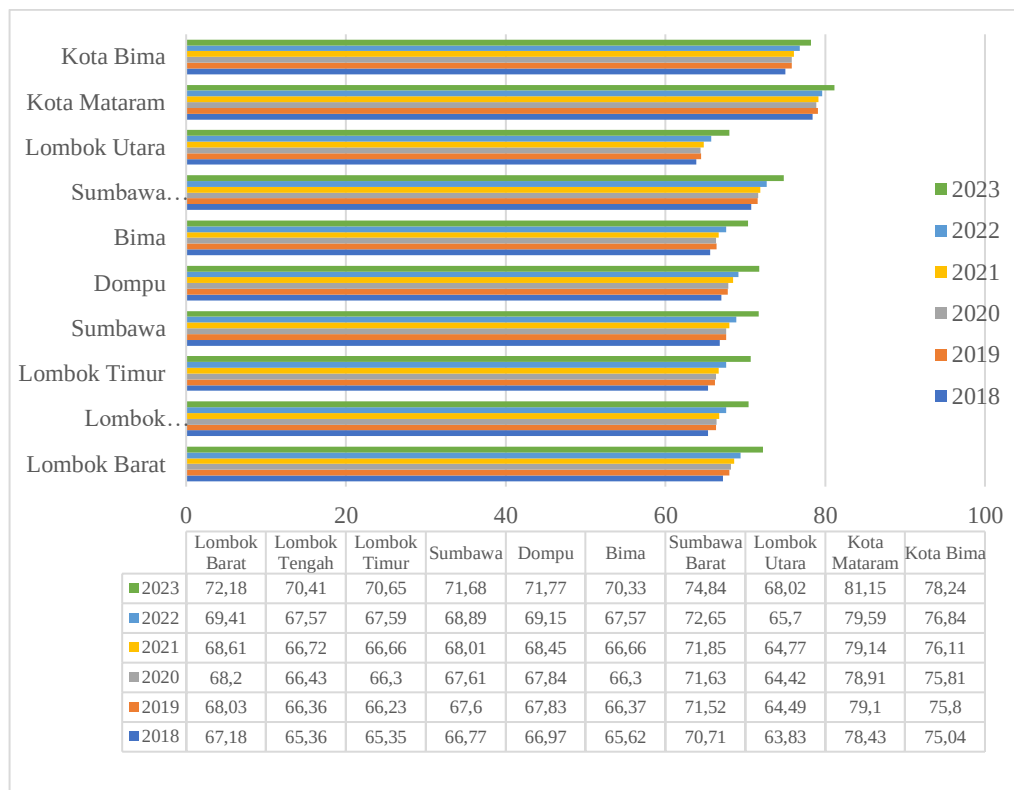
Lombok Timur memiliki jumlah penduduk terpadat dan yang paling mencolok dibandingkan kabupaten lainnya. Hal ini karena penduduk asli di Pulau Lombok adalah suku Sasak sekaligus menjadi etnis mayoritasnya. Selain itu, Pulau Lombok lebih terkenal dengan berbagai macam tempat wisata baik itu pantai maupun gunung sehingga dapat mengundang banyak turis tampaknya tertarik untuk berlibur atau bahkan menetap. Sebaliknya, menunjukkan bahwa penduduk di Pulau Sumbawa masih jarang dibandingkan dengan Pulau Lombok, akan tetapi besaran penduduk ini harus dipertahankan pada tingkat tertentu, agar kondisi daerah dapat terjaga baik dari segi estetika, kenyamanan dan kesehatan guna menghasilkan penduduk yang berkualitas.

Arsyad (2014) memberikan pandangan bahwa konsep pendapatan atau sisi ekonomi saja mempunyai kekurangan, yaitu kurang memperhatikan dari sisi perbedaan karakteristik suatu wilayah tertentu, kemudian indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat IPM, karena IPM merupakan gabungan dari aspek ekonomi dan sosial. IPM merupakan indikator dalam mengukur taraf hidup masyarakat (Pamiati & Woyanti, 2021).

IPM menjadi salah satu alat ukur pembangunan yang digunakan dalam target pembangunan pemerintah. IPM mengukur pembangunan kualitas hidup manusia yang dituangkan dalam tiga pendekatan dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan dimensi penghidupan layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama

Sekolah (RLS). Sedangkan dimensi penghidupan layak diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS, 2020).

Berikut merupakan perkembangan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi NTB periode tahun 2018-2023.



Sumber: (BPS Provinsi NTB, 2024) (diolah)

Gambar 1. 5 IPM Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018-2023

(Persen)

Berdasarkan gambar 1.5, perkembangan capaian pembangunan manusia ditingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Kualitas indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota NTB pada tahun 2018-2023 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dengan urutan posisi pertama ditempati oleh Kota Mataram, kondisi ini terjadi karena Kota Mataram menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan, tidak hanya bagi Pulau Lombok tetapi juga untuk wilayah Provinsi NTB lainnya,

sehingga pembangunan manusia yang ada di dalamnya cenderung lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi NTB.

Pada tahun 2023 beberapa kabupaten/kota di NTB telah berada level IPM tinggi diantaranya yaitu Kota Mataram sebesar 81,15 persen, Kota Bima sebesar 78,24 persen dan Sumbawa Barat sebesar 74,84 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih berada pada level IPM sedang. Pada tahun 2020 secara umum seluruh wilayah NTB mengalami penurunan capaian IPM. Hal ini terjadi karena penurunan capaian indikator pengeluaran per kapita akibat pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan penurunan capaian IPM ditahun 2020.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cindilina T. Gabriel, Een N. Walewangko & Dennij Mandeij (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, berpengaruh positif karena pertumbuhan ekonomi di daerah maju akan lebih tinggi daripada daerah berkembang sehingga pada akhirnya akan mampu menciptakan dan memperbesar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Penelitian yang sejenis yang dilakukan oleh Rini Raharti, Titi Laras & Oktavianti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Juliana & Aris Soelistyo (2019) hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penduduk yang tidak ditangani dengan efektif akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar. Hal ini serupa dengan hasil Feni Nursetiningrum (2018) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anin Nabail Azim, Hady Sutjipto & Rah Adi Fahmi Ginanjar (2022) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan, hal ini mengimplikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia mampu menurunkan ketimpangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda (2013) bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan.

Merujuk dari penelitian sebelumnya di atas, bahwa untuk melihat ketimpangan pembangunan digunakan analisis indeks Williamson juga dilakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebasnya. Adapun kebaharuan dari penelitian ini adalah dilakukannya penggabungan dan atau penambahan alat analisis dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan hipotesis Kuznets dan tipologi Klassen agar penyampaian informasi mengenai ketimpangan pembangunan dapat lebih jelas dipahami melalui berbagai analisis.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi yang menyatakan ketimpangan di Provinsi NTB lebih tinggi daripada Provinsi lain membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Bersadarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023?

2. Apakah hipotesis Kuznets tentang kurva “U terbalik” berlaku di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023?
3. Tentukan pengklasifikasian wilayah menurut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023!
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, IPM dan PDRB secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023?
5. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, IPM dan PDRB secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.
2. Mengetahui apakah hipotesis Kuznets tentang kurva “U terbalik” berlaku di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.
3. Mengetahui pengklasifikasian wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk, IPM dan PDRB secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.

5. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk, IPM dan PDRB secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi kebijakan yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bahan referensi bacaan bagi peneliti berikutnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengambil data sekunder dari *website* resmi Badan

Pusat Statistik. *Website* tersebut menyajikan data-data yang valid mengenai perekonomian Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2024																2025							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	ACC Judul																								
3	Penyusunan Usulan Penelitian																								
4	Seminar Usulan Penelitian																								
5	Revisi Usulan Penelitian																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								
8	Revisi Skripsi																								